

kerakyatan) belum kontinyu dan setara diperhatikan, serta dikembangkan pula struktur organisasi pemeliharannya.

Dimensi permusyawaratan di kalangan wakil rakyat memang harus menghasilkan pengangkatan aspirasi rakyat ketingkat sistem kenegaraan pada satu pihak. Namun pada pihak lain penjelasannya kepada rakyat yang diwakili perlu dipelihara secara dinamis. Kunjungan ke daerah-daerah oleh wakil rakyat pada umumnya tidak menopang kontak dengan rakyat dibandingkan dengan komunikasinya dengan pemda dan dinas-dinas.

Dengan demikian rakyat akan berpartisipasi dengan pertimbangan, baik tawaran program maupun tawaran tokoh-tokoh pada berbagai aras, termasuk calon-calon presiden dan wakil presiden yang ditonjolkan oleh masing-masing organisasi politik. Itulah salah satu tafsiran positif dan kreatif terhadap ungkapan agar tiap organisasi kelompok kekuatan politik sudah dapat mulai memotivasi "jagonya" masing-masing.

Persoalan-persoalan yang menjadi tantangan bagi implementasi demokrasi Pancasila di masa kini dan mendatang tampaknya akan berkisar pada aspek-aspek operasional dari pada suatu konsepsi.

Boleh dikatakan perkembangan ide demokrasi Pancasila masih lebih banyak berbicara pada "ideological in outlook" dan kerangka normatifnya. Karena itu, kebutuhan mendesak berkenaan perubahan dan perkembangan kemasyarakatan ialah kemampuan sistem nilainya dalam menjawab setiap perubahan dan perkembangan kemasyarakatan. Isu-isu demokratisasi, keterbukaan politik, suksesi nasional dan perbedaan pendapat serta tuntutan-tuntutan orsospol akan kehidupan politik yang lebih baik, merupakan kebutuhan empiris menyangkut bagaimana segi-segi operasional demokrasi Pancasila menjadi penun tun kehidupan politik nasional.

Kalau ideologi asing mendasarkan penyelesaian politik atas dasar superioritas kelompok dan mayoritas, ideologi Pancasila lebih mencerminkan aspek nasionalitas. Perumusan demokrasi Pancasila yang bukan liberal dan bukan mayoritas-mayoritas, mengesankan bahwa proses pencarian bentuk nyata demokrasi Pancasila masih membutuhkan banyak waktu sebelum format yang tegas dan implementatif dari sistem nilainya memiliki daya pengaruh yang riil.

Tak mengherankan kalau perjalanan berpolitik dan bernegara Indonesia dalam upaya pentrans-